



**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO AKTIVITAS,  
RASIO DESENTRALISASI DAN RASIO KETERGANTUNGAN  
DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA  
KEUANGAN DAERAH  
KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN**  
NPM: 1415100058

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN  
NPM : 1415100058  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO  
AKTIVITAS, RASIO DESENTRALISASI DAN RASIO  
DAN KETERGANTUNGAN DAERAH UNTUK  
MENILAI KINERJA KEUANGAN KOTA BINJAI

MEDAN, 11 MARET 2019


**KETUA**

  
(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

**ANGGOTA I**

  
(Rabima Br Purba, SE., M.Si., Ak. CA)

**DEKAN**

  
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

**ANGGOTA II**

  
(Bagus Handoko SE., M.Si.,)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUIJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN  
NPM : 1415100058  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO  
AKTIVITAS, RASIO DESENTRALISASI DAN RASIO  
DAN KETERGANTUNGAN DAERAH UNTUK  
MENILAI KINERJA KEUANGAN KOTA BINJAI

MEDAN, 11 MARET 2019

**KETUA**



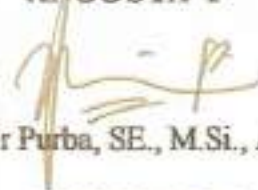
(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

**ANGGOTA II**



(Bagus Handoko, SE., M.Si)

**ANGGOTA I**



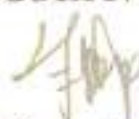
(Rahima Br Purba, SE., M.Si., Ak. CA)

**ANGGOTA III**



(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)

**ANGGOTA IV**



(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHRISTINA MELATI PANGARIBUAN  
Npm : 1415100058  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Ketergantungan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kota Binjai.

Dengan Ini Menyatakan Bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain . (Plagiat)
2. Memberi izin hak bebas royalti Non Eksklusif Kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan , November 2018



CHRISTINA MELATI PANGARIBUAN  
1415100058

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHRISTINA MELATI PANGARIBUAN  
Npm : 1415100058  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Sosial Sains  
Tempat Tanggal Lahir : Medan  
Alamat : Medan- Binjai km 13,5 (psr kecil)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubung dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan , November 2018



CHRISTINA MELATI PANGARIBUAN  
1415100058



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8459077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

: CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN

Tgl. Lahir :

: MEDAN BINJAI / 08 Juni 1995

Nomor Pokok Mahasiswa :

: 1415100058

Program Studi :

: Akuntansi

Spesialisasi :

: Akuntansi Sektor Publik

Semester Kredit yang telah dicapai :

: 127 SKS, IPK 3.24

Sehingga mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan strata di universitas pembangunan panca budi medan	<input type="checkbox"/>
Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT BTPN cabang Binjai	<input type="checkbox"/>
Analisis pengelolaan keuangan pemerintahan daerah terhadap pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kota binjai melalui APBD	<input checked="" type="checkbox"/>

Demikian disetujui oleh saya untuk mengajukan judul skripsi ini dibenarkan tanda



Medan, 10 Oktober 2017

Permohonan,

*Christina Melati Br Pangaribuan*

( CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN )

Nomor : .....

Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
Dekan

( Drs. Adwar Sarani, M.Si )

Tanggal : 11 Oktober 2017

Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Akuntansi

( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

*Rahmawati*

Tanggal : 18/10-2017

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :

*Benny*

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. 09/10/2017

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Selasa, 10 Oktober 2017 10:11:33



**TANDA BEBAS PUSTAKA**

No. 1518 / Pmp / Bp / 2018

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

Medan, 04 DEC 2018

Perpustakaan



Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 30 November 2018  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN  
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 08 Juni 1995  
Nama Orang Tua : W PANGARIBUAN  
N. P. M : 1415100058  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 087868013384  
Alamat : medan jln pasar kecil km 13,5



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO AKTIVITAS, RASIO DESENTRALISASI DAN RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI. Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah diijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

UKT 50%  
2.500.000  
4.600.000

20/12/18



Hormat saya

*[Signature]*  
CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN  
1415100058

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asal) - Mhs.ybs.

# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 22-11-18 5:39:14 PM

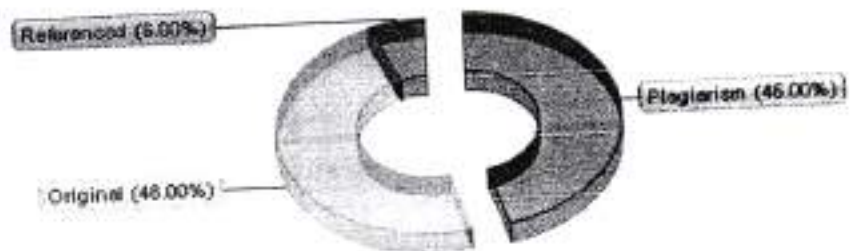
## "CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN\_1415100058\_AKUNTANSI.docx

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License2



2/0

### Relation chart:



### Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

#### Top sources of plagiarism:

% 28	wrds: 3051	<a href="http://zonaskripsi.blogspot.com/2012/03/skripsi-akuntansi-1.html">http://zonaskripsi.blogspot.com/2012/03/skripsi-akuntansi-1.html</a>
% 18	wrds: 1959	<a href="http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/BAB-III-RPJMD-2014-2019.pdf">http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/BAB-III-RPJMD-2014-2019.pdf</a>
% 18	wrds: 1937	<a href="https://id.123dok.com/document/wq2r5vez-analisis-rasio-keuangan-sebagai-pengukuran-keberhasilan">https://id.123dok.com/document/wq2r5vez-analisis-rasio-keuangan-sebagai-pengukuran-keberhasilan</a>

Show other Sources:]

#### Processed resources details:

284 - Ok / 50 - Failed

Show other Sources:]

#### Important notes:

Google Books:

Ghostwriting services:





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpeb@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas  
 Fakultas  
 Dosen Pembimbing I  
 Dosen Pembimbing II  
 Nama Mahasiswa  
 Jurusan/Program Studi  
 Nomor Pokok Mahasiswa  
 Bidang Pendidikan  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi  
 SOSIAL SAINS  
 RAHIMAH BR PURBA SE, M.Si, Ak.  
 BAGUS HARDOKO SE, M.Si  
 CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN  
 Akuntansi  
 1415100058  
 STRATA I  
 Pengaruh Rasio Kemudahan, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi  
 Dan Rasio Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  
 Daerah Kota Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12-2-2018	Judul, kata pengantar, latar belakang ush, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Kerangka Konsep, Hipotesis, tabel definisi Operasional. Metodologi.		
2-4-2018	Rumusan masalah, Tujuan, & definisi operasional. Kerangka konseptual, Uji autokorelasi		
2-4-2018	Rumusan <math>\leftrightarrow</math> Tujuan, Daftar Pustaka.		
		 Acc Aseminortan 18/4-2018 	

Medan, 10 April 2018  
 Diketahui/Ditanda-tangani oleh:  
 Dekan,







UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas  
 Fakultas  
 Pembimbing I  
 Pembimbing II  
 Mahasiswa  
 Jurusan/Program Studi  
 Pokok Mahasiswa  
 Bidang Pendidikan  
 Tugas Akhir/Skripsi

: Universitas Pembangunan Panca Budi  
 : SOSIAL SAINS  
 : Rahimo Br Purba SE, Msi, Ak, CA  
 : Bagus Handoko SE, Msi  
 : CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN  
 : Akuntansi  
 : 1415100056  
 : STRATA I  
 : Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas, Rasio Desentralisasi  
 : Dan Rasio Ketergantungan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan  
 : Daerah Kota Binjai.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2018	Bab III & Bab IV - Konsep konseptual. Bab V Kesimpulan & Saran Daftar Pustaka.		
2018	Abstrak Kesimpulan		
		Acc Sidag 31/10-2018	

Medan, 29 Oktober 2018  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan



Dr. Surya Nila, S.H.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas  
 Fakultas  
 Pembimbing I  
 Pembimbing II  
 Mahasiswa  
 Jurusan/Program Studi  
 Nomor Pokok Mahasiswa  
 Bidang Pendidikan  
 Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi  
 SOSIAL SAINS  
 Rahima Br. Purba SE, Msi, AK, CA  
 Bagus Handoko SE, Nsi

CHRISTINA MELATI BR PANGARIBUAN

Akuntansi

1415100058

STRATA I

Analisis Rasio Kemudahan, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi  
 Dan Rasio Ketergantungan Daerah Untuk Menilai Kinerja  
 Kelangkaan Kota Baji

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/10-2018	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Tabel 4-7 - Perbaiki Daftar Pustaka	<i>[Handwritten initials]</i>	
1-2018	Acc. Sidang Meja Hijau	<i>[Handwritten initials]</i>	<i>[Handwritten signature]</i> 12/10/2018

Medan, 29 Oktober 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,





## ABSTRAK

---

Kinerja keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah kota binjai Tahun 2009-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian, rasio aktivitas pada belanja langsung cenderung mengalami penurunan. Dengan Nilai belanja tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 42.4% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,16%, belanja langsung masih sangat kurang dengan rata-rata 24,65%. Oleh karena itu rasio belanja langsung relatif kecil. Adapun rasio desentralisasi pada tahun 2009-2017 selalu mengalami kenaikan setiap tahun nya sebesar 7, 97% dan rasio ketergantungan daerah mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 83,38% yang sebelumnya pada tahun 2009 berkisar 92,12%. Dengan melihat hasil tersebut maka perkembangan kinerja keuangan pemerintah Kota Binjai dapat dikatakan belum stabil.

***Kata Kunci : Rasio Kemandirian , Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Ketergantungan Daerah***



## ABSTRACT

---

Financial performance is a form of accountability for the management of economic resources owned by a government entity. The problem in this study was to assess the financial performance of the regional government of Binjai City in 2009-2017 by using the independence ratio, activity ratio, decentralization degree ratio and regional dependency ratio. The data source used in this study is secondary data. The data analysis method used is quantitative descriptive method. From the results of the study the ratio of activity to direct expenditure in total expenditure tends to decrease with the highest value in 2009 which is 42.4% and the lowest in 2017 is 18.16% direct expenditure is still very low with an average of 24.65% therefore the ratio direct shopping is relatively small. The decentralization ratio in 2009-2017 always experienced an annual increase of 7, 97% and regional dependence experienced a decline in 2017 of 83.38% which in 2009 was around 92.12%. By seeing these results, the development of Binjai city government financial performance can be said to be unstable.

***Keywords: Independence Ratios, Activity Ratios, Decentralization Ratios and Regional Dependency Ratios***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: **“Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Daerah untuk menilai kinerja keuangan Daerah Kota Binjai ”** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama proses penyusunan, peneliti tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan sehingga pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhamad Isa Indrawan SE., MM. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Surya Nita SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution. S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi di Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima br Purba, S.E, M.Si Ak., CA. selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Bagus Handoko, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah memberi arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun rapi dan sistematis..
6. Teristimewa peneliti persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta “Wisker Pangaribuan” dan mama tersayang “Asliana Br Aritonang”. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini, atas doa yang tak berkesudahan, motivasi dan bimbingan yang selalu mendidik serta bantuan moril dan material yang tidak akan bisa terbalaskan kepada penulis.
7. Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kota Binjai yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh karyawan yang telah membantu selama penelitian.

penulis mengharapkan adanya masukan dan saran dari ;pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Oktober 2018  
Penulis

Christina M. Br Pangaribuan

1415100058



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Pengertian pengelolaan .....	11
2. Pengukuran Kinerja Keuangan .....	14
3. Analisis Rasio Keuangan .....	15
a. Rasio kemandirian daerah .....	16
b. Rasio Aktivitas.....	17
c. Rasio Derajat Desentralisasi.....	18
d. Rasio Ketergantungan Daerah.....	19
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	20
a. Pengertian APBD .....	20
b. Stuktur APBD .....	28
B. Tinjauan Penelitian Terhadapulu.....	28
C. Kerangka Konseptual .....	31

<b>BAB III .</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Penelitian .....	32
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
	C. Jenis Data .....	33
	D. Sumber Data.....	34
	E. Subjek Dan Objek Penelitian.....	34
	F. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	34
	G. Teknik Pengumpulan Data .....	37
	H. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	38
	1. Gambaran Umum Penelitian .....	38
	B. Pembahasan .....	43
	1. Rasio Kemandirian Daerah (X1) .....	43
	2. Rasio Aktivitas (X2) .....	48
	3. Rasio Derajat Desentralisasi.....	55
	4. Rasio Ketergntungan Daerah.....	59
	C. Uji Statistik Deskriptif .....	62
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Rasio Keuangan .....	3
Tabel 1.2 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah.....	4
Tabel 1.3 Perbedaan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang .....	9
Tabel 2.1 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah (Kemandirian Daerah) jajajaja .....	17
Tabel 2.2 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah (Derajat Desentralisasi).....	19
Tabel 2.3 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah (Ketergantungan Daerah).....	20
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	33
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Dan Ukuran Variabel .....	35
Tabel 4.1 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2009.....	39
Tabel 4.2 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2010.....	40
Tabel 4.3 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2011 .....	40
Tabel 4.4 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2012.....	41
Tabel 4.5 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2013.....	41
Tabel 4.6 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2014.....	42
Tabel 4.7 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2015.....	42
Tabel 4.8 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2016.....	43
Tabel 4.9 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2017.....	44
Tabel 4.10 Skala Interval Kemandirian Daerah .....	44
Tabel 4.11 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	45
Tabel 4.12 Rasio Kemandirian Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017.....	45
Tabel 4.13 Belanja Tidak Langsung (Belanja rutin) Kota Binjai Tahun 2009-2017.....	49
Tabel 4.14 Belanja Langsung (belanja Pembangunan) Kota Binjai Tahun 2009-2017.....	51
Tabel 4.15 Rasio Aktivitas Kota Binjai Tahun 2009-2017.....	53
Tabel 4.16 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah.....	56



Tabel 4.17	Rasio Derajat Desentralisasi Kota Binjai Tahun 2009-20 .....	56
Tabel 4.18	Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah.....	56
Tabel 4.19	Rasio ketergantungan Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017 .....	60
Tabel 4.20	Deskripsi Data Variabel Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017 (dalam % PAD) ..	63
Tabel 4.21	Hasil Uji Statistik Deskriptif (PAD).....	63
Tabel 4.22	Deskripsi Data Variabel Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017 (dalam % APBD).....	65
Tabel 4.23	Hasil Uji Statistik Deskriptif (APBD) .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Struktur APBD .....	28
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	31
Gambar 4.1 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2009-2017 .....	47
Gambar 4.2 Grafik Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin) .....	50
Gambar 4.3 Grafik Rasio Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) .....	52
Gambar 4.4 Grafik Rasio Aktivitas Tahun 2009-2017 .....	54
Gambar 4.5 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2009-2017 .....	58
Gambar 4.6 Grafik Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2009-2017 .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dibagian sektor publik khususnya di Indonesia semakin luas dan berkembang dengan adanya pelayanan publik menjadi peran dan fungsi utama dari birokrasi pemerintahan. Salah satu pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan melalui APBD yang langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Pemda) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan diberikan wewenang yang luas dalam membuat semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Lahir nya peraturan pemerintah Nomor. 25 Tahun 2004 yang meliputi tentang system perencanaan pembangunan nasional (Tahun 2004 Nomor 104).

Untuk melihat kemampuan dalam mengelola keuangan serta melaksanakan otonomi daerah salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, ialah dengan menganalisis laporan pengelolaan yang telah dibuat pemerintah berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran sendiri menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah yang dapat menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.anggaran memiliki peran utama dalam alokasi sumber daya publik,stabilitas,distribusi,perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Setiap penganggaran dalam pengeluaran APBD harus didukung dalam kepastian penerimaan yang cukup kepada daerah sebagaimana mengelola keuangan yang dituangkan dalam APBD untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantu dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran sektor publik dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik serta strategi yang diterapkan bagi instansi pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, pengukuran sektor publik penting dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Menurut Mamesah dalam Halim (2009), keuangan daerah dapat diartikan : semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki



/ dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan hasil dari rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah Kota Binjai, dan dapat dilihat pada table 1-1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Daerah**

Tahun	Rasio Keuangan Daerah				
	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Rasio Aktivitas (%)		Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Rasio Ketergantungan Daerah (%)
		BTL	BL		
2009	4,73	57,60	42,40	4,36	92,12
2010	5,06	66,43	33,57	4,26	84,24
2011	5,20	75,86	24,14	4,57	87,90
2012	8,72	75,66	24,34	6,99	80,21
2013	8,03	81,03	18,96	6,91	86,06
2014	10,04	80,94	19,06	8,95	89,17
2015	10,23	80,22	19,78	9,28	90,71
2016	11,90	78,46	21,47	10,63	89,37
2017	18,98	81,76	18,16	15,82	83,38

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah pada table 1.1, menunjukkan bahwa kontribusi PAD ( Pendapatan Anggaran Daerah) dari transfer pusat, provinsi dan pinjaman selama sembilan tahun berakhir masih ada kurang dari 10%. Jika ditinjau berdasarkan skala interval kemandirian keuangan daerah , hasil presentase kurang dari 10% memiliki arti bahwa rasio kemandirian daerah sangat kurang. Menurut Abdul Halim (2007:233) “semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama (Pemerintahan Pusat Dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya”.

Tingkat kemandirian daerah, aktivitas, derajat desentralisasi dan ketergantungan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah, dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
0.00-10,00	Sangat Kurang
10.01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam debby 2013

Berdasarkan rasio aktivitas/keserasian dapat dilihat pada tabel 1.1 masih ada rasio keuangan yang belum stabil dan rata-rata rasio mengalami penurunan pada akhir tahun terakhir pada biaya langsung, bila ini terus menerus berlangsung maka akan sulit bagi Kota Binjai untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan secara mandiri dan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi) padahal dalam hal pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai daerahnya sendiri, perhitungan rasio aktivitas/keserasian belanja tidak langsung pada tahun (2009-2017) selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, sedangkan belanja langsung atau belanja pembangunan tahun 2009 bernilai sebesar 42,40% dan tahun pada tahun 2010 belanja langsung mengalami penurunan yang sangat drastis rendah bernilai sebesar 18,16%.

Dilihat dari perhitungan rasio desentralisasi berdasarkan tabel 1.1, dimana kontribusi PAD selama tahun (2009-2017) kurang dari 10%. Apabila ditinjau dari skala interval kemandirian keuangan daerah, dimana kontribusi PAD yang kurang 10% mengandung arti bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan masih sangat kurang. Maka akan sulit bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Dari hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah tabel 1.1, dimana kontribusi pendapatan transfer dari total pendapatan selama lima tahun terakhir tahun (2009-2017) mengalami peningkatan sangat tinggi, yakni menunjukkan angka diatas 80%. Hasil perhitungan rasio pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan transfer dari total pendapatan selama sembilan tahun terakhir, paling rendah sebesar 80,21% pada tahun 2012, selebihnya merupakan

PAD dan pendapatan yang sah sebesar 19,79% dari total pendapatan. Bearti pendapatan transfer lebih besar dari pada pendapatan yang lainnya dalam pendapatan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan daerah sangat besar berpengaruh terhadap pemerintahan pusat/provinsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian dengan judul “ **PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN, RASIO AKTIVITAS, RASIO DESENTRALISASI DAN RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian, rasio aktivitas/keserasian, rasio derajat desentralisasi masih belum stabil dan rata-rata rasio tersebut mengalami penurunan 10% disebabkan adanya penganggaran belanja yang belum stabil sehingga perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan belum stabil di Kota Binjai.
2. Besarnya tingkat perhitungan rasio ketergantungan daerah mencapai peningkatan 80% disebabkan karena adanya pendapatan transfer lebih besar dari pada pendapatan lain-lain sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi masih sangat besar.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan sesuai dengan permasalahan dan Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah dalam penelitian maka penulis membuat batasan masalah mencakup kinerja keuangan yang dibatasi dengan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Aktivitas Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kota Binjai.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio kemandirian?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio aktivitas/keserasian?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio ketergantungan daerah?



### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio kemandirian.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio aktivitas/keserasian.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai jika dilihat dari rasio ketergantungan daerah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti merupakan penambahan wawasan dan ilmu dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui pengaruh rasio keuangan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis.
2. Bagi Pemerintahan Daerah Kota Binjai sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama Pemerintahan Kota Binjai yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah dalam mengelolah keuangan serta mengukur kinerja keuangan Pemerintah yang dapat bermanfaat bagi Kota Binjai.

3. Bagi peneliti lanjut sebagai bahan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan rasio keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

### **G. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu Indah Putri Harahap, “Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Melalui APBD 2009-2013”. Sedangkan penelitian ini berjudul “ Pengaruh rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah untuk menilai kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai.”

Adapun perbedaan Penelitian dapat dilihat pada tabel mapping keaslian penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penelitian terdahulu (Ayu Indah)</b>	<b>Peneliti Sekarang (Christina Melati)</b>
1	Judul penelitian	Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Melalui APBD 2009-2013	Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Ketergantungan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai

2	Variable penelitian	Penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel bebas, dimana 2 variabel bebasnya itu adalah: Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Dalam Mengukur Kinerja dan variable terikatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Binjai.	Penelitian sekarang menggunakan 4 variabel bebas : Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Ketergantungan Daerah dan variabel terikatnya yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai.
3	Metode penelitian	Deskriptif	Kuantitatif Deskriptif
4	Lokasi penelitian	Kota Binjai	Kota Binjai
5	Tahun penelitian	Tahun 2009	Tahun 2018

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Pengertian Pengelolaan keuangan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, “ Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban ”.

Renyowijoyo (2008:216) bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkannya peraturan pemerintahan republik Indonesia No, 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan tersebut di dukung dengan keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melengkapi sistem.

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut para ahli adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu / berfokus pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan secara transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien. (PP RI No. 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah)

Darise (2009) mengungkapkan bahwa salah satu sebab berlakunya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah termasuk didalamnya terdapat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industry dengan adanya otonomi daerah sewaktu daerah dalam mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 1 peraturan pemerintah (PP) NO. 58 Tahun 2005 yaitu tentang Pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2011:179) Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah antara lain :

- a. UUD 1945 Amandemen IV Bab VIII
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- d. UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- e. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- f. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Pemendagri No. 13 Tahun 2006 Pemendagri NO. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- j. Peraturan Daerah terkait.

Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa unsur yakni :

- a. Kepala Daerah yang jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Sekretaris Daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah.
- c. Bendahara Umum Daerah yang disingkat (BUD) bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- d. Kepala Organisasi pengelolaan keuangan daerah adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pelaksana pengelolaan keuangan daerah. .

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016, yang didasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 dalam Pasal 10 ayat (2), Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.



- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Salah satu manfaat dan tujuan sebuah laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi keuangan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kerja.

Halim (2008) dalam debby silvia (2013:3) “Untuk menganalisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menfelola keungan daerah dengan melakukan analisis rasio keungan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas daerah dalam membelanjakan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:158) Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja publik dimaksudkan untuk dapat

memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga ukuran kinerja sektor publik dimaksud untuk menunjukkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi lembaga. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambilan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja yang berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

### **3. Analisis Rasio Keuangan**

Menurut Halim (2011:163) Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.

Menurut Halim (2009) Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :

- a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
- b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya
- c. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman atau membeli obligasi.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintahan dapat dilihat dari rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

### 1) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) ini menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Mahmudi (2011:170) Rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{(\text{Transfer Pusat} + \text{provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Olahan (Mahmudi, 2011 : 170).

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Menurut Halim (2007:233) “Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eskternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya”.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

## **2) Rasio Aktivitas / keserasian**

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Menurut Halim (2011:172) menyatakan Rasio Aktivitas/keserasian merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Atau semakin tinggi persentase dana yang

dialokasikan untuk belanja tidak langsung (belanja rutin) berarti presentase belanja langsung (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil . secara sederhana , rasio aktivitas/keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

Rasio Belanja Tidak Langsung/Rutin adalah:

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin/Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Belanja Langsung/Pembangunan:

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan/Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Olahan Debby Silvia (2013:16) – Ekonomi Akt UMSU dalam Kasmir (2011).

### 3) Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2011:169) Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerima daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2011:169).

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

#### **4) Rasio Ketergantungan Daerah**

Menurut Mahmudi (2011:170) Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingakat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Olahan Debby Silvia (2013:16) dalam Mahmudi (2011:170)

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

#### **4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Halim dan Syam (2012:38) ditetapkannya Peraturan Derah bahwa APBD sebagai anggran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terperinci. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya yang terkait dalam aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 2) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 3) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

##### **a. Struktur APBD**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

## 1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a) Pendapatan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pendapatan daerah berasal dari retribusi. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2000, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut:
  - (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
  - (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  - (3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP.
  - (4) Retribusi penggantian biaya cetak.
  - (5) Retribusi pelayanan pemakaman.
  - (6) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
  - (7) Retribusi pelayanan pasar.
  - (8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  - (9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - (10) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
  - (11) Retribusi pengujian kapal perikanan.
  - (12) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- (13) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan.
  - (14) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.
  - (15) Retribusi jasa usaha terminal
  - (16) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
  - (17) Retribusi jasa usaha tempat khusus penginapan/villa
  - (18) Retribusi izin mendirikan bangunan
  - (19) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
  - (20) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.
  - (21) Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air.
  - (21) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
  - (22) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.
  - (23) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
  - (24) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirincikan menurut objek pendapatan yang mencakup:
- (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/APBD.
  - (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN.
  - (3) Bgaian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pmda. Jenis pendapatan meliputi:
- (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  - (b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  - (c) Jasa giro.
  - (d) Pendapatan bunga.
  - (e) Tuntutan ganti rugi
  - (f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - (g) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
- c) Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil
- (1) Pajak dan Sumber Daya Alam.
  - (2) Dana Alokasi Umum (DAU). Dan
  - (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).
- d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup hibah
- (1) Barang atau uang dan kota.
  - (2) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
  - (3) Pendapatan dana darurat serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya.

## 2) Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran uang dan rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 27 belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan:

- a) Organisasi.
- b) Fungsi
- c) Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tersebut dinyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah, baik menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah setempat yang antara lain terdiri dari:

- a) Belanja Aparatur Daerah meliputi:
  - (1) Belanja Administrasi Umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas.
  - (2) Belanja operasi dan pemeliharaan, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan.
  - (3) Belanja Modal
- b) Pelayanan Publik, meliputi:
  - (1) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan
  - (2) Belanja Tidak Tersangka.

Antara Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2006 terdapat perbedaan dalam menguraikan jenis belanja daerah. istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:

**a) Belanja Langsung**

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari:

- (1) Belanja Pegawai.
- (2) Belanja Barang dan Jasa.
- (3) Belanja Modal.

**b) Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

- (1) Belanja Pegawai
- (2) Bunga.
- (3) Subsidi.
- (4) Hibah, Bantuan Sosial
- (5) Belanja Bagi Hasil.
- (6) Bantuan Keuangan, dan
- (7) Belanja Tidak Terduga



### c) **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan uang yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah dalam peraturan Nomor 58 Tahun 2005 pasal 28 ayat 1 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi:

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun lalu.
- (b) Pencairan/Transfer dari Dana Cadangan.
- (c) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.
- (d) Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

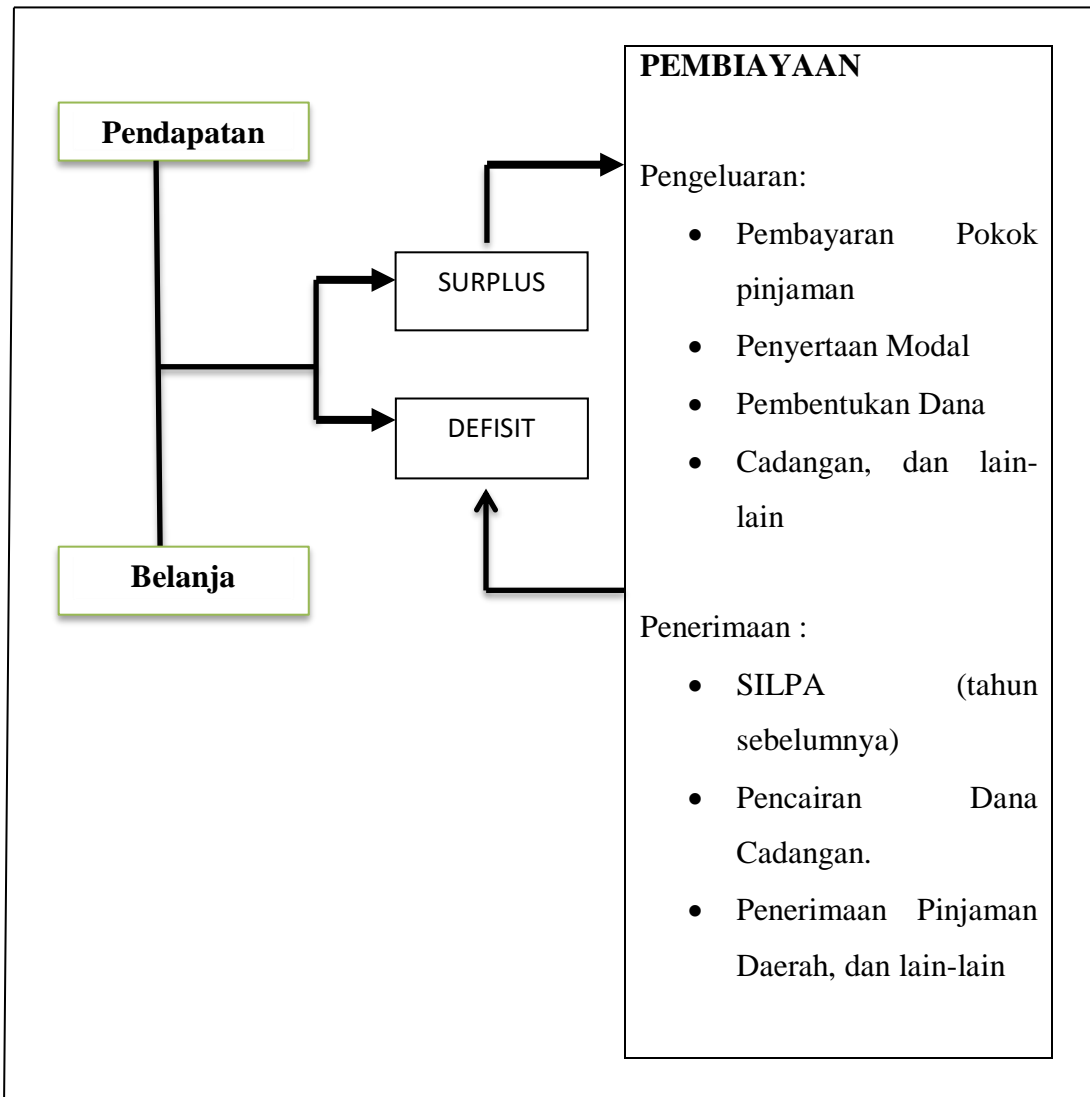
(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi:

- (a) Pembiayaan Modal.
- (b) Pembentukan/Transfer ke Dana Cadangan.
- (c) Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo, dan

(d) Pemberian Pinjaman.

Menurut Nordiawan, dkk (2007:43) “ Jika APBD mengalami defisit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada surplus”.

**Gambar 2.1**  
**Struktur APBD**



Sumber : Nordiawan, dkk (2007:42)

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah tinjauan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi pengembangan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

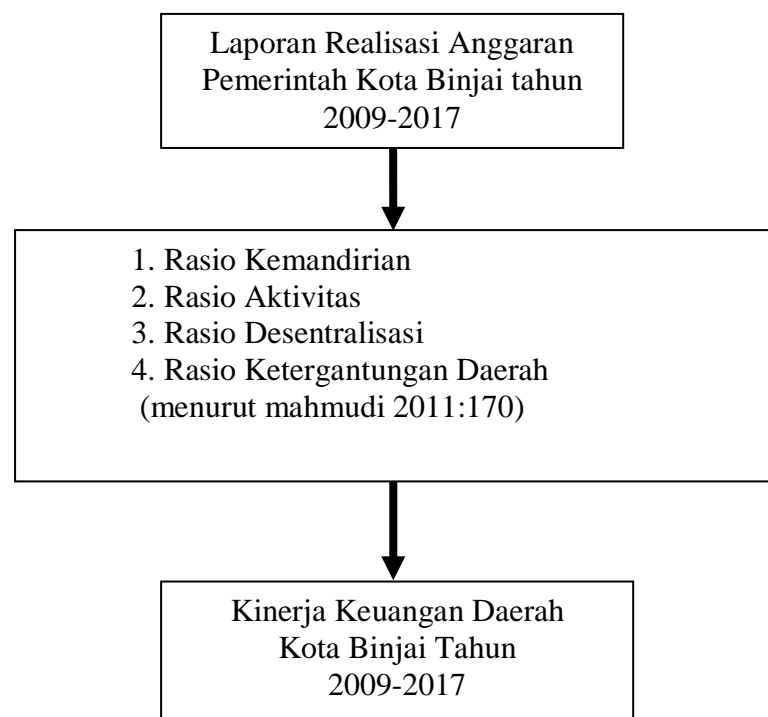
<b>No</b>	<b>Penelitian (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Adinda Marizka (2009)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Pemerintah Kota Medan	1)Menunjukkan bahwa pemerintahan Kota Medan dalam merealisasikan pajak daerah pada tahun 2003 sampai 2007 dapat dikatakan efesien dan efektif  2) Pemerintah Kota Medan masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah
2	Debby Silvia (2013)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahn Kota Tanjung Balai Tahun 2008-2012	1)kinerja keuangan pemerintah Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya stabil dimana rasio efesiensi dalam 3 tahun dan rasio aktivitas/keserasian yang mana belanja rutin yang lebih prioritas, kinerja keuangan

			Pemerintah Kota Tanjung Balai Tahun 2008-2012
3	Nanik Wahyuni (2007)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang	1) pertumbuhan Kota Malang menunjukkan pertumbuhan positif pada Tahun 2006-2007.
4	Sugeng (2007)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kendiri	1) mempunyai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun sebesar 58,1% pada tahun 2007". kabupaten sendiri
5	Espinoza (2014)	Pengaruh Penerapan Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan	1) pelaksanaan anggaran berbasis kinerja cenderung menurun. Dalam realisasi anggaran belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pendapatan secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintahan Kota Medan 2) anggaran berbasis kinerja dapat dikatakan

			cukup baik karena PAD mengalami peningkatan
--	--	--	---

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.2**

**Kerangka Konseptual**

**Sumber : Penulis 2018**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiyono (20015: 53) pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik hanya satu variabel maupun lebih atau menghubungkan dengan variabel yang lain . Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka, data yang peneliti kumpulkan berbentuk data dan angka seperti laporan keuangan atau numeric seperti rasio keuangan daerah.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai (BPKPAD) yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Binjai.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2017 s/d selesai. Yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

kegiatan	Bulan																							
	april				mei				jun				Jul				agus				sep			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset awal /Pengajuan judul																								
Penuysunan proposal																								
seminar proposal																								
penuyusana n skripsi																								
Bimbingan skripsi																								

Sumber : Diolah Penulis 2018.

### C. Jenis Data

1. Data Kualitatif berupa keadaan dan gambaran umum Kota Binjai yang merupakan profil daerah.
2. Data Kuantitatif berupa laporan perhitungan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Binjai



#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulis adalah data sekunder (data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainya berupa data runtut waktu atau *time series*) yaitu laporam realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

#### **E. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kota Binjai. Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Binjai Tahun 2009-2017.

#### **F. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

##### **1. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:3 ).Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel bebas yaitu pengaruh rasio kemandirian daerah, rasio aktivitas, rasio desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan variabel terikat yaitu kinerja keuangan pemerintahan daerah Kota Binjai.dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan perekonomian daerah. Menurut Rusiadi (2014:50)“Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan

atau mempengaruhi faktor-faktor yang diukur, manipulasi, atau dipilih oleh penulis untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diamati”.

## 2. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Defenisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan defenisi. Defenisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek dalam elemen-elemen yang dapat diukur dan dioperasionalkan dalam penelitian.

**Tabel 3.2**  
**Defenisi Operasional dan Ukuran Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Defenisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kinerja keuangan pemerintah Kota Binjai (Y)	rangkaian yang tersusun secara sistematis dan kemampuan untuk menunjukkan peran pertanggungjawaban untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar menilai kinerja. Menurut Mahmudi (2001:163)	Kinerja keuangan Realisasi APBD PAD	Rasio efisiensi
Rasio Kemandirian Daerah (X1)	Penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari	$\frac{PAD}{((Transfer\ Pusat + provinsi) + Pinjaman)} \times 100\%$	Rasio

	<p>pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.</p> <p>Menurut Mahmudi (2011:170)</p>		
<p>Rasio Aktivitas (X2)</p>	<p>Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti presentase belanja langsung cenderung semakin kecil</p> <p>Menurut Halim (2007: 235)</p>	<p><i>belanja Tidak langsung</i></p> $\frac{\text{Total Belanja}_{\text{Rutin}}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ <p><i>belanja langsung</i></p> <p>(Total Belanja Pembanguna /modal) /(Total Belanja Daerah) X 100%</p>	Rasio
<p>Rasio desentralisa si (X3)</p>	<p>Perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.</p> <p>Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi</p> <p>Menurut Mahmudi (2011: 169)</p>	$\frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
<p>Rasio Ketergant</p>	<p>Semakin tinggi rasio ini maka semakin</p>		Rasio

Daerah (X4)	<p>tingkat besar ketergantungan terhadap Pemerintah Daerah. Menurut Mahmudi (2011:170)</p>	$\frac{\text{pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	
-------------	--	---	--

### G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah data sekunder, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data sekunder melalui pengambilan data yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.

### H. Metode Analisis Data

Dalam analisis data yang diperoleh, digunakan metode yang bersifat *deskriptif*. Metode analisa deskriptif dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasi, selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang teliti. Dalam hal ini data dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Desentralisasi, dan Rasio Ketergantungan Daerah untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah pemerintahan Kota Binjai Tahun 2009-2017.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan menggunakan software SPSS. Metode dan teknik analisis dilakukan dengan Statistik Deskriptif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Penelitian**

Sejak dibuat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah semua negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran pendapatan, belanja, transfer, surplus/devisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisi lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah/pusat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berikut ini adalah tabel laporan yang penulis susun, berdasarkan analisis terhadap laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai 2009-2017 :

**Tabel 4.1**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2009**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	421.272.557.085,00	396.155.883.068,13
Belanja Daerah	421.746.082.949,87	383.466.883.801,00
Surplus / Defisit	(473.525.864,87)	12.688.999267,00
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	8.473.525.864,87	1.319.279.094,87
-pengeluaran pembiayaan	8.000.000.000,00	6,150.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Thun Berkenaan	-	7.858.278.362,00

**Tabel 4.2**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2010**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	451.134.379.706,00	442.053.734.808,77
Belanja Daerah	456.231.613.006,00	418.220.391.835,00
Surplus / Defisit	(5.097.233.200,00)	23.833.342.973,77
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	6.579.233.300,00	7.858.278.362,00
-pengeluaran pembiayaan	1.500.000.000,00	1.400.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Thun Berkenaan	0,00	30.291.621.335,77

**Tabel 4.3**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2011**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	583.821.026.072,00	579.565.917.617,71
Belanja Daerah	606.044.406.326,77	546.497.391.346,84
Surplus / Defisit	(22.223.380.254,77)	33.068.526.270,87
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	22.223.380.354,77	23.303.354.928,77
-pengeluaran pembiayaan	4.140.010.350,00	3.608.503.300,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Thun Berkenaan	-	56.371.881.199,64

**Tabel 4.4**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2012**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	685.618.914/292,00	689.107.085.691,25
Belanja Daerah	730.709.030.274,64	650.087.241.200,00
Surplus / Defisit	(45.090.115.982,64)	39.019.844.491,25
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	45.090.115.982,64	52.112.095.021,64
-pengeluaran pembiayaan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Thun Berkenaan	-	91.131.939.512,89

**Tabel 4.5**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2013**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	777.139.382.117,00	711.568.038.362,01
Belanja Daerah	863.361.971.139,89	702.167.562.649,26
Surplus / Defisit	(86.222.589.022,89)	9.400.475.712,75
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	91.131.939.512,89	91.131.939.512,89
-pengeluaran pembiayaan	4.909.350.490,00	3.658.160.490,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	96.874.254.735,64

**Tabel 4.6**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2014**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	825.842.656.546,33	804.091.375.966,10
Belanja Daerah	918.030.764.513,97	804.308.312.949,00
Surplus / Defisit	(92.188.097.967,64)	(216.936.982,90)
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	96.620.049.860,64	96.674.841.735,64
-pengeluaran pembiayaan	4.431,951.893,00	1.931.264.585,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	94.526.640.167,74



**Tabel 4.7**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2015**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	78.327.792.810,58	76.711.784.263,00
Belanja Daerah	84.409.491.022,36	69.036.209.984,00
Surplus / Defisit	(908.092.661,10)	(21.4675.574.279,00)
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	51.993.127.117,32	94.526.640.167,74
-pengeluaran pembiayaan	52.901.219.778,42	1.033.679.485,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	51.993.127.117,32

**Tabel 4.8**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2016**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Pendapatan Daerah	1.048.464.949.879,42	915.399.098.803,00
Belanja Daerah	1.046.968.177.493,32	945.078.606.296,00
Surplus / Defisit	(908.092.661,10)	(30.167.174.743,00)
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	51.993.127.177,32	52.243.802.177,32
-pengeluaran pembiayaan	52.901.219.778,42	3.662.767.715,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Thun Berkenaan	-	18.413.859.659,32

**Tabel 4.9**  
**Anggaran dan Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2017**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Daerah	964.903.163.076,00	879.551.758.424,45
Belanja Daerah	978.587.604.010,32	849.025.483.683,96
Surplus / Defisit	(14.273.184.659,32)	29.937.653.915,52
Pembiayaan Daerah:		
-penerimaan pembiayaan	18.163.184.659,32	18.668.815.234,15
-pengeluaran pembiayaan	3.890.000.000,00	2.975.530.204,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Thun Berkenaan	-	45.624.834.945,67

## B. Pembahasan

Analisis rasio Keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Beberapa rasio yang diteliti berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan realisasi APBD kota Binjai Tahun 2009-2017 sebagai berikut;

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ )

Rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
0.00-10,00	Sangat Kurang
10.01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. 11**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Hasil perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Kota Binjai Tahun 2009-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Pendapatan Transfer (Rp)</b>	<b>RKKD (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2009	17.272.605.866,42	364.953.958.201,71	4,73	Instruktif
2010	18.832.884.480,77	372.387.616.528,00	5,06	Instruktif
2011	26.470.115.887,71	509.466.891.745,00	5,20	Instruktif
2012	48.178.078.782,50	552.755.195.445,75	8,72	Instruktif
2013	49.172.643.726,01	612.353.316.836,00	8,03	Instruktif
2014	71.967.137.635,10	717.043.184.708,00	10,04	Instruktif
2015	78.327.792.810,58	765.383.991.195,00	10,23	Instruktif
2016	97.339.497.584,36	818.059.491.533,00	11,90	Instruktif
2017	139.217.621.697,48	733.334.136.727,00	18,98	Instruktif
Rata-rata			7,99	

Sumber: Data Olahan 2018

1. Tahun 2009 =  $\frac{Rp.17.272.605.866,42}{Rp.364.953.958.201,71} \times 100\% = 4,73\%$
2. Tahun 2010 =  $\frac{Rp.18.832.884.480,77}{Rp.372.387.616.528,00} \times 100\% = 5,06\%$
3. Tahun 2011 =  $\frac{Rp.26.470.115.887,71}{Rp.509.466.891.745,00} \times 100\% = 5,20\%$
4. Tahun 2012 =  $\frac{Rp.48.178.078.782,50}{Rp.552.755.195.445,75} \times 100\% = 8,72\%$
5. Tahun 2013 =  $\frac{Rp.49.172.643.726,01}{Rp.612.353.316.836,00} \times 100\% = 8,03\%$
6. Tahun 2014 =  $\frac{Rp.71.967.137.635,10}{Rp.717.043.184.708,00} \times 100\% = 10,04\%$
7. Tahun 2015 =  $\frac{Rp.78.327.792.810,58}{Rp.765.383.991.195,00} \times 100\% = 10,23\%$

$$8. \text{ Tahun 2016} = \frac{Rp.97.339.497.584,36}{Rp.818.059.491.533,00} \times 100\% = 11,90\%$$

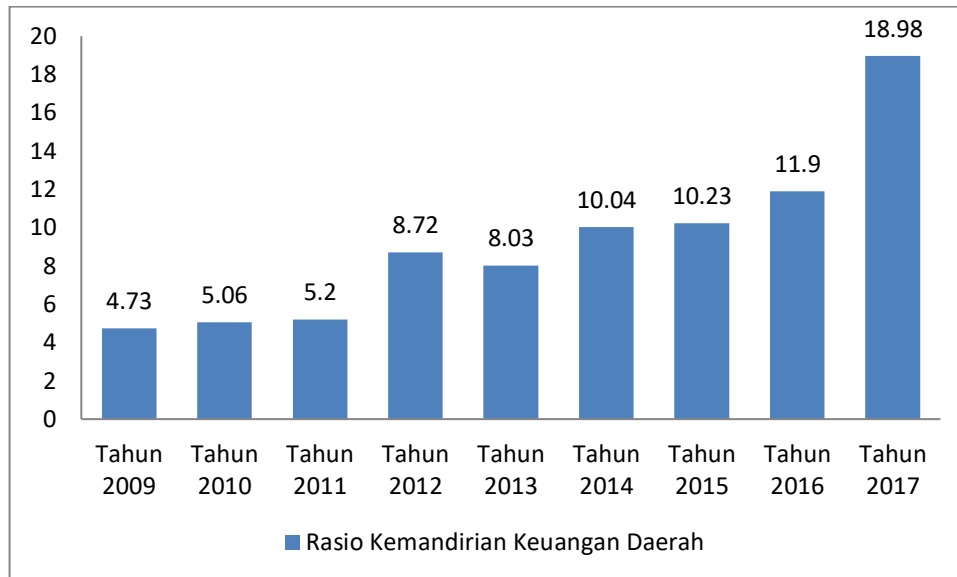
$$9. \text{ Tahun 2017} = \frac{Rp.139.217.621.697,48}{Rp.733.334.136.727,00} \times 100\% = 18,98\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4. Di atas kemampuan keuangan daerah Kota Binjai pada tahun 2009-2013 tergolong masih rendah yakni kurang dari 10% dimana jika ditinjau berdasarkan skala interval kemandirian keuangan daerah termasuk ke dalam kriteria sangat kurang (0,00-10,00%) dan pada tahun 2014-2017 kemampuan keuangan daerah Kota Binjai jika ditinjau berdasarkan skala interval kemandirian keuangan daerah termasuk ke dalam kriteria kurang (10,01-20,00%). Adapun pola hubungan rasio kemandirian keuangan daerah termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2009 dimana nilainya sebesar 4,73% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,98%. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yaitu hanya 7,99.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

Bila dilihat dari tabel 4. Di atas dapat digambarkan grafik rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Tahun 2009-2017**



Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari gambar 4. Di atas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yaitu senilai 18,98 dan terendah pada tahun 2009 yaitu 4,73. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Binjai dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi

kemandirian keuangan DPPKAD Kota Binjai secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

## **2. Rasio Aktivitas (X<sub>2</sub>)**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja langsung yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Binjai.

### **a) Rasio Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)**

Rasio belanja tidak langsung dihitung dengan cara membandingkan total belanja tidak langsung (belanja rutin) dengan Total Belanja Daerah

(TBD). Besarnya rasio belanja tidak langsung Kota Binjai tahun 2009-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.13**  
**Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)**  
**Kota Binjai Tahun 2009-2017**

<b>Tahun</b>	<b>BTL (Rp.)</b>	<b>TBD (Rp.)</b>	<b>Rasio Belanja Tidak Langsung</b>
2009	220.874.661.428,00	383.466.883.801,00	57,60
2010	277.840.220.041,00	418.220.391.835,00	66,43
2011	414.557.495.370,84	546.497.391.346,84	75,86
2012	491.878.213.097,00	650.087.241.200,00	75,66
2013	568.964.879.524,56	702.167.562.649,26	81,03
2014	651.023.466.787,00	804.308.312.949,00	80,94
2015	709.650.820.019,00	884.622.896.746,00	80,22
2016	741.550.724.698,00	945.078.606.296,00	78,46
2017	694.158.131.070,00	849.025.483.683,96	81,76
Rata-rata			74,63

Sumber: Data Olahan2018

1. Tahun 2009 =  $\frac{Rp.220.874.661.428,00}{Rp.383.466.883.801,00} \times 100\% = 57,60\%$
2. Tahun 2010 =  $\frac{Rp.277.840.220.041,00}{Rp.418.220.391.835,00} \times 100\% = 66,43\%$
3. Tahun 2011 =  $\frac{Rp.414.557.495.370,84}{Rp.546.497.391.346,84} \times 100\% = 75,86\%$
4. Tahun 2012 =  $\frac{Rp.491.878.213.097,00}{Rp.650.087.241.200,00} \times 100\% = 75,66\%$
5. Tahun 2013 =  $\frac{Rp.568.964.879.524,56}{Rp.702.167.562.649,26} \times 100\% = 81,03\%$
6. Tahun 2014 =  $\frac{Rp.651.023.466.787,00}{Rp.804.308.312.949,00} \times 100\% = 80,94\%$
7. Tahun 2015 =  $\frac{Rp.709.650.820.019,00}{Rp.884.622.896.746,00} \times 100\% = 80,22\%$



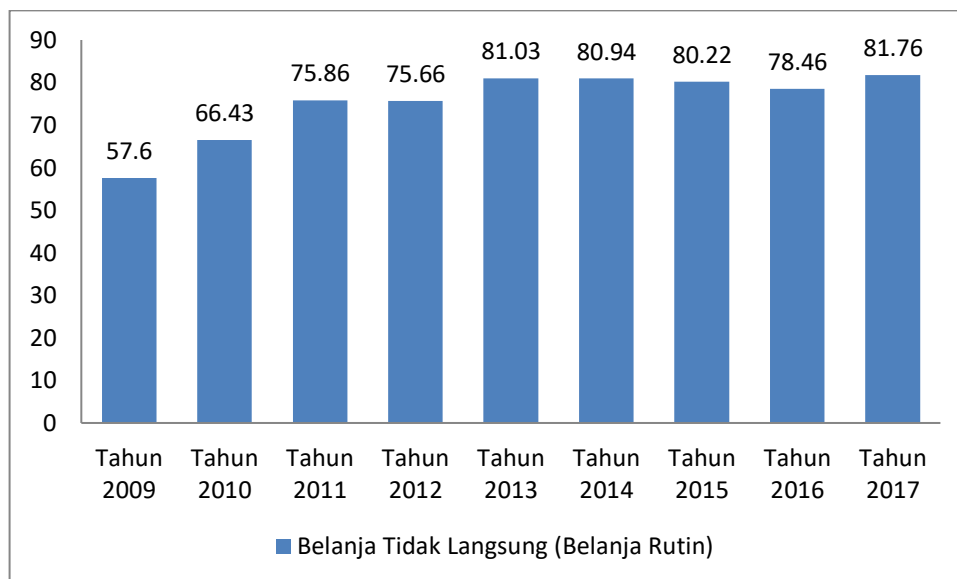
$$8. \text{ Tahun 2016} = \frac{Rp.741.550.724.698,00}{Rp.945.078.606.296,00} \times 100\% = 78,46\%$$

$$9. \text{ Tahun 2017} = \frac{Rp.694.158.131.070,00}{Rp.849.025.483.683,96} \times 100\% = 81,76\%$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. menunjukkan besarnya belanja tidak langsung dalam total belanja daerah lebih dari 50% sehingga dapat dikatakan besar. Belanja tidak langsung digunakan pemerintah untuk membelanjakan kegiatan rutinnnya atau kegiatan operasionalnya untuk pelayanan dan gaji karyawan.

Dari tabel 4. di atas dapat digambarkan grafik belanja tidak langsung sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Grafik Belanja Tidak Langsung (Belanja Rutin)**



Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari gambar 4. di atas dapat dilihat bahwa total belanja tidak langsung (belanja rutin) dalam total belanja daerah dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 81,76% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 57,6%.

## b) Rasio Belanja Langsung (Belanja Pembangunan)

Rasio belanja langsung dihitung dengan cara membandingkan total belanja langsung (belanja pembangunan) dengan Total Belanja Daerah (TBD). Besarnya rasio belanja langsung pada Kota Binjai tahun 2009-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.14**  
**Belanja Langsung (Belanja Pembangunan)**  
**Kota Binjai Tahun 2009-2017**

<b>Tahun</b>	<b>BL (Rp.)</b>	<b>TBD (Rp.)</b>	<b>Rasio Belanja Langsung</b>
2009	162.592.222.373,00	383.466.883.801,00	42,40
2010	140.380.171.794,00	418.220.391.835,00	33,57
2011	131.939.895.976,00	546.497.391.346,84	24,14
2012	158.209.028.103,00	650.087.241.200,00	24,34
2013	133.102.683.124,70	702.167.562.649,26	18,96
2014	153.284.846.162,00	804.308.312.949,00	19,06
2015	174.972.076.727,00	884.622.896.746,00	19,78
2016	202.943.191.598,00	945.078.606.296,00	21,47
2017	154.059.962.293,96	849.025.483.683,96	18,16
Rata-rata			24,65

Sumber: Data Olahan 2018

$$1. \text{ Tahun 2009} = \frac{Rp.162.592.222.373,00}{Rp.383.466.883.801,00} \times 100\% = 42,40\%$$

$$2. \text{ Tahun 2010} = \frac{Rp.140.380.171.794,00}{Rp.418.220.391.835,00} \times 100\% = 33,57\%$$

$$3. \text{ Tahun 2011} = \frac{Rp.131.939.895.976,00}{Rp.546.497.391.346,84} \times 100\% = 24,14\%$$

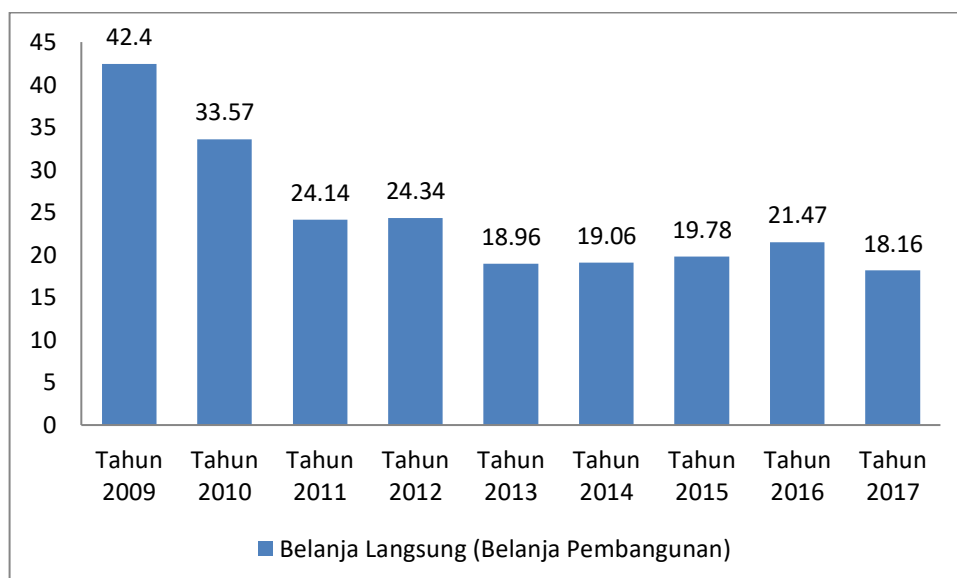
$$4. \text{ Tahun 2012} = \frac{Rp.158.209.028.103,00}{Rp.650.087.241.200,00} \times 100\% = 24,34\%$$

5. Tahun 2013 =  $\frac{Rp.133.102.683.124,70}{Rp.702.167.562.649,26} \times 100\% = 18,96\%$
6. Tahun 2014 =  $\frac{Rp.153.284.846.162,00}{Rp.804.308.312.949,00} \times 100\% = 19,06\%$
7. Tahun 2015 =  $\frac{Rp.174.972.076.727,00}{Rp.884.622.896.746,00} \times 100\% = 19,78\%$
8. Tahun 2016 =  $\frac{Rp.202.943.191.598,00}{Rp.945.078.606.296,00} \times 100\% = 21,47\%$
9. Tahun 2017 =  $\frac{Rp.154.059.962.293,96}{Rp.849.025.483.683,96} \times 100\% = 18,16\%$

Bila dilihat berdasarkan perhitungan pada tabel 4. menunjukkan dari tahun 2009-2017 belanja langsung masih dibawah 50% dari total belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana masih dibawah 50% dari total belanja daerah.

Bila dilihat dari tabel 4. di atas dapat digambarkan grafik belanja langsung sebagai berikut :

**Gambar 4.3**  
**Grafik Rasio Belanja Langsung (Belanja Pembangunan)**



Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari gambar 4. di atas dapat dilihat bahwa rasio belanja langsung (belanja pembangunan) dalam total belanja daerah cenderung mengalami penurunan dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 42,4% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,16%.

Rasio aktivitas menghitung belanja tidak langsung (belanja rutin) dan rasio belanja langsung (belanja pembangunan). Dimana melihat rasio belanja tidak langsung (RBTL) atau rasio belanja langsung (RBL) yang lebih prioritas dalam total belanja daerah. Besarnya rasio aktivitas pada Kota Binjai tahun 2009-2017, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Rasio Aktivitas**  
**Kota Binjai Tahun 2009-2017**

<b>Tahun</b>	<b>RBTL (%)</b>	<b>RBL (%)</b>	<b>Prioritas</b>
2009	57,60	42,40	Belanja Tidak Langsung
2010	66,43	33,57	Belanja Tidak Langsung
2011	75,86	24,14	Belanja Tidak Langsung
2012	75,66	24,34	Belanja Tidak Langsung
2013	81,03	18,96	Belanja Tidak Langsung
2014	80,94	19,06	Belanja Tidak Langsung
2015	80,22	19,78	Belanja Tidak Langsung
2016	78,46	21,47	Belanja Tidak Langsung
2017	81,76	18,16	Belanja Tidak Langsung

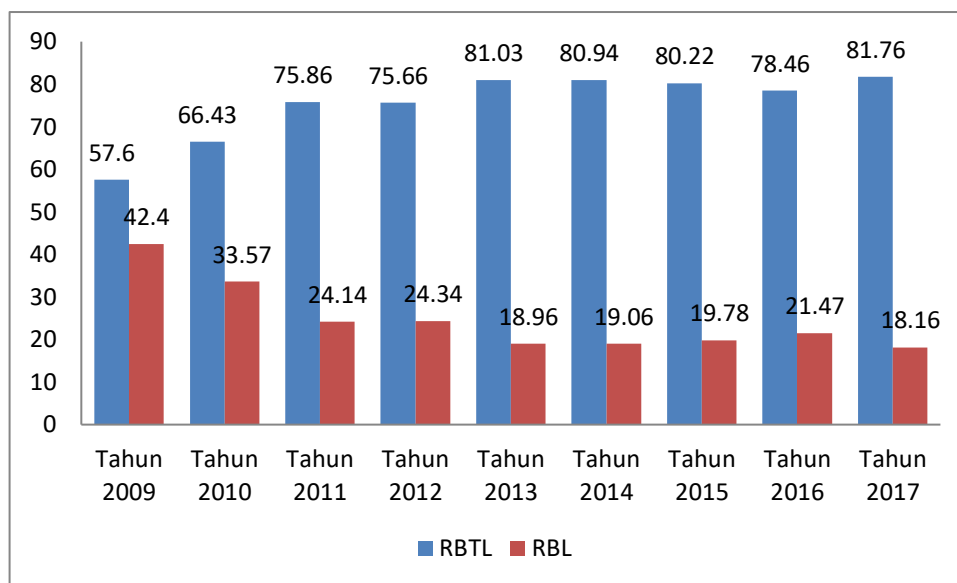
Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2017 yang lebih prioritas adalah belanja tidak langsung (belanja rutin). Oleh

karena itu, rasio belanja langsung yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Binjai.

Dari tabel 4. di atas dapat digambarkan grafik rasio aktivitas sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Grafik Rasio Aktivitas**  
**Tahun 2009-2017**



Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Dari gambar 4. di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009-2017 belanja tidak langsung (belanja rutin) lebih prioritas dari pada belanja langsung (belanja pembangunan) yang berarti bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja tidak langsung sehingga belanja langsung relatif kecil. Belanja tidak langsung tertinggi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2009 sedangkan belanja langsung tertinggi pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2017. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah belanja tidak langsung maka belanja langsung akan

semakin tinggi sedangkan semakin tinggi belanja tidak langsung maka belanja langsung akan semakin rendah.

Dari perhitungan rasio aktivitas dapat dilihat bahwa rasio belanja tidak langsung dan rasio belanja langsung yang belum stabil dari tahun ke tahun. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja tidak langsung yang masih besar (74,63%) dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja langsung (24,65%). Besarnya alokasi dana untuk belanja tidak langsung terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Binjai yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja langsung, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja tidak langsung yang mengakibatkan belanja langsung untuk pemerintah Kota Binjai kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya pemerintah Kota Binjai diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

### **3. Rasio Derajat Desentralisasi**

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
0.00-10,00	Sangat Kurang
10.01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Besarnya rasio derajat desentralisasi pada Kota Binjai Tahun 2009-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.17**  
**Rasio Derajat Desentralisasi**  
**Kota Binjai Tahun 2009-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Rasio Derajat Desentralisasi (%)</b>
2009	17.272.605.866,42	396.155.883.068,13	4,36
2010	18.823.884.480,77	442.053.734.808,77	4,26
2011	26.470.115.887,71	579.565.917.617,71	4,57
2012	48.178.078.782,50	689.107.085.691,25	6,99
2013	49.172.643.726,01	711.568.038.362,01	6,91

2014	71.967.137.635,10	804.091.375.966,10	8,95
2015	78.327.792.810,58	843.711.784.005,58	9,28
2016	97.339.497.584,36	915.399.098.803,00	10,63
2017	139.217.621.697,48	879.551.755.424,48	15,82
Rata-rata			7,97

Sumber: Data Olahan 2018

1. Tahun 2009 =  $\frac{Rp.17.272.605.866,42}{Rp.396.155.883.068,13} \times 100\% = 4,36\%$
2. Tahun 2010 =  $\frac{Rp.18.823.884.480,77}{Rp.442.053.734.808,77} \times 100\% = 4,26\%$
3. Tahun 2011 =  $\frac{Rp.26.470.115.887,71}{Rp.579.565.917.617,71} \times 100\% = 4,57\%$
4. Tahun 2012 =  $\frac{Rp.48.178.078.782,50}{Rp.689.107.085.691,25} \times 100\% = 6,99\%$
5. Tahun 2013 =  $\frac{Rp.49.172.643.726,01}{Rp.711.568.038.362,01} \times 100\% = 6,91\%$
6. Tahun 2014 =  $\frac{Rp.71.967.137.635,10}{Rp.804.091.375.966,10} \times 100\% = 8,95\%$
7. Tahun 2015 =  $\frac{Rp.78.327.792.810,58}{Rp.843.711.784.005,58} \times 100\% = 9,28\%$
8. Tahun 2016 =  $\frac{Rp.97.339.497.584,36}{Rp.915.399.098.803,00} \times 100\% = 10,63\%$
9. Tahun 2017 =  $\frac{Rp.139.217.621.697,48}{Rp.879.551.755.424,48} \times 100\% = 15,82\%$

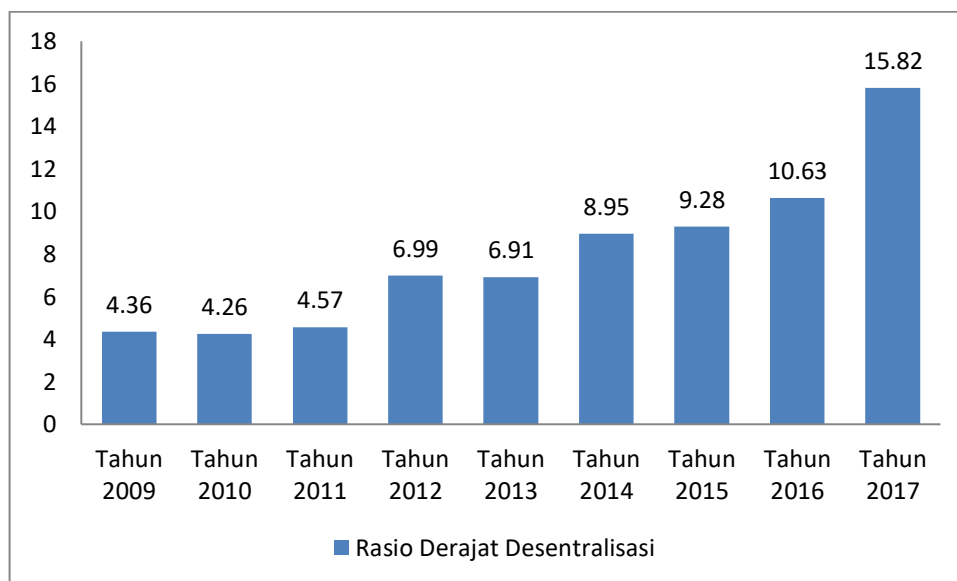
Bila dilihat dari tabel 4 di atas bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah pada tahun 2009-2017 mengalami kenaikan, namun jika menggunakan rasio derajat desentralisasi dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Binjai masih sangat kurang. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2009-2017 yaitu 7,97. Jika ditinjau dalam skala interval kemandirian keuangan daerah maka rata-rata tersebut masih tergolong dalam kategori sangat kurang (0,00-10,00%). Hal ini



berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Binjai untuk menggali atau mengelola pendapatan masih sangat rendah. Untuk itu kedepannya Kota Binjai harus lebih berupaya untuk lebih dapat meningkatkan PAD nya, baim dengan menggali potensi baru maupun dengan mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.

Dari tabel 4. Diatas dapat dibuat grafik derajat desentralisasi yang dapat dilihat pada gambar 4. Berikut ini

**Gambar 4.5**  
**Grafik Rasio Derajat Desentralisasi**  
**Tahun 2009-2017**



Sumber: Data Olahan 2018

Dari gambar 4. Diatas dapat dilihat bahwa rasio derajat desentralisasi tertinggi pada tahun 2017 yaitu 15,82% dan terendah pada tahun 2010 yaitu 4,26% yang berarti jumlah PAD tertinggi dalam total pendapatan daerah pada tahun 2017 dan jumlah PAD terendah dalam total pendapatan daerah pada tahun 2010.

#### 4. Rasio Ketergantungan Daerah (X<sub>4</sub>)

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer (PT) yang diterima oleh penerimaan daerah dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.18**  
**Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
0.00-10,00	Sangat Kurang
10.01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Besarnya rasio ketergantungan daerah Kota Binjai pada Tahun 2009-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Rasio Ketergantungan Daerah**  
**Kota Binjai Tahun 2009-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Transfer (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Rasio Ketergantungan Daerah (%)</b>
2009	364.953.958.201,71	396.155.883.068,13	92,12
2010	372.387.616.528,00	442.053.734.808,77	84,24
2011	509.466.891.745,00	579.565.917.617,71	87,90
2012	552.755.195.445,75	689.107.085.691,25	80,21
2013	612.353.316.836,00	711.568.038.362,01	86,06
2014	717.043.184.708,00	804.091.375.966,10	89,17
2015	765.383.991.195,00	843.711.784.005,58	90,71
2016	818.059.491.533,00	915.399.098.803,00	89,37
2017	733.334.136.727,00	879.551.755.424,48	83,38
Rata-rata			87,02

Sumber: Data Olahan, 2018

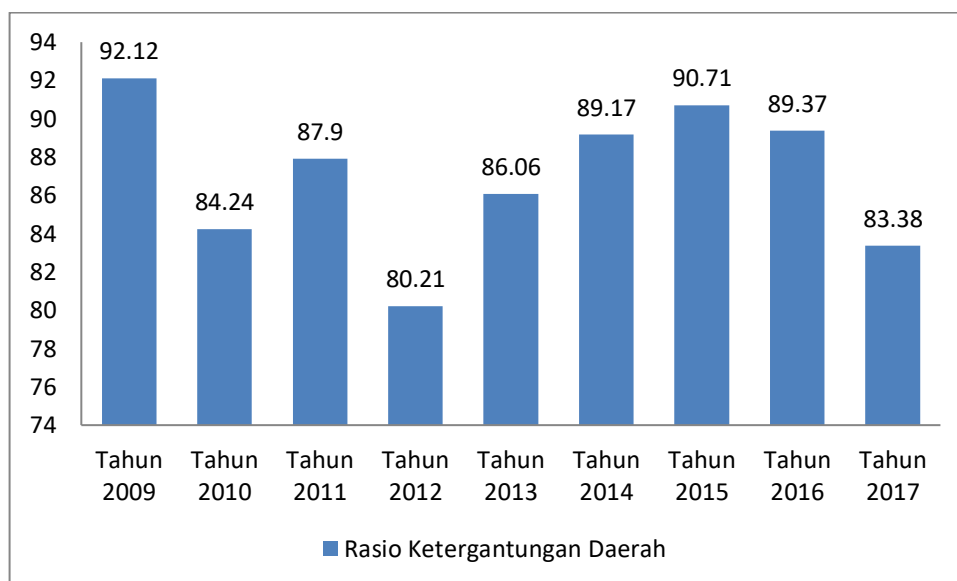
1. Tahun 2009 =  $\frac{Rp.364.953.958.201,71}{Rp.396.155.883.068,13} \times 100\% = 92,12\%$
2. Tahun 2010 =  $\frac{Rp.372.387.616.528,00}{Rp.442.053.734.808,77} \times 100\% = 84,24\%$
3. Tahun 2011 =  $\frac{Rp.509.466.891.745,00}{Rp.579.565.917.617,71} \times 100\% = 87,90\%$
4. Tahun 2012 =  $\frac{Rp.552.755.195.445,75}{Rp.689.107.085.691,25} \times 100\% = 80,21\%$
5. Tahun 2013 =  $\frac{Rp.612.353.316.836,00}{Rp.711.568.038.362,01} \times 100\% = 86,06\%$
6. Tahun 2014 =  $\frac{Rp.717.043.184.708,00}{Rp.804.091.375.966,10} \times 100\% = 89,17\%$
7. Tahun 2015 =  $\frac{Rp.765.383.991.195,00}{Rp.843.711.784.005,58} \times 100\% = 90,71\%$
8. Tahun 2016 =  $\frac{Rp.818.059.491.533,00}{Rp.915.399.098.803,00} \times 100\% = 89,37\%$

$$9. \text{ Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.733.334.136.727,00}}{\text{Rp.879.551.755.424,48}} \times 100\% = 83,38\%$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. Diatas, ketergantungan daerah Kota Binjai terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Binjai pada tahun 2009-2017 yaitu 87,02. Ketergantungan daerah paling tinggi pada tahun 2009 yaitu 92,12% dan ketergantungan daerah paling rendah pada tahun 2012 yaitu 80,21%. Namun Ketergantungan daerah Kota Binjai pada tahun tersebut masih menunjukkan tingkat ketergantungan diatas 50% dalam total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari PAD dan pendapatan lain-lain yang sah dalam total pendapatan daerah.

Dari tabel 4. Diatas dapat dibuat grafik rasio ketergantungan daerah, yang dapat dilihat pada gambar 4. Berikut

**Gambar 4.6**  
**Grafik Rasio Ketergantungan Daerah**  
**Tahun 2009-2017**



Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan gambar 4. Diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan daerah tertinggi pada tahun 2009 yaitu 92,12% dan paling terendah yaitu pada tahun 2012 yaitu 80,21%. Dimana pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2012.

### **C. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Untuk memberikan gambaran data pada variabel penelitian yang terdiri dari Kinerja Keuangan (PAD), rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), rasio aktivitas (RA), rasio derajat desentralisasi (RDD), dan rasio ketergantungan daerah (RKD), maka dapat dijelaskan dengan analisis deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Berikut ini dijelaskan analisis deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Deskripsi Data Variabel**  
**Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai**  
**Tahun 2009-2017 (dalam% PAD)**

Tahun	PAD (Y)	RKKD (X <sub>1</sub> )	RA(X <sub>2</sub> )	RDD (X <sub>3</sub> )	RKD (X <sub>4</sub> )
2009	15,68	4,73	57,60	4,36	92,12
2010	18,83	5,06	66,43	4,26	84,24
2011	26,47	5,20	75,86	4,57	87,90
2012	48,18	8,72	75,66	6,99	80,21
2013	49,17	8,03	81,03	6,91	86,06
2014	71,70	10,04	80,94	8,95	89,17
2015	82,45	10,23	80,22	9,28	90,71
2016	93,72	11,90	78,46	10,63	89,37
2017	98,54	18,98	81,76	15,82	83,38

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018

Adapun hasil olah data statistik deskriptif Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017 menggunakan IBM SPSS Statistics Version 25 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 21**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**(PAD)**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RKKD	9	5	19	9,21	4,464
RA	9	58	82	75,33	8,162
RDD	9	4	16	7,97	3,739
RKD	9	80	92	87,02	3,854
PAD	9	16	99	56,08	31,948
Valid N (listwise)	9				

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang berasal dari hasil output IBM SPSS Statistics Version 25 menunjukkan bahwa jumlah sampel atau N data valid yang

akan diteliti adalah 9 sampel. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan variabel dependen yaitu variabel kinerja keuangan atau PAD (Y) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 16 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 99 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) variabel kinerja keuangan atau PAD (Y) sebesar 56,08. Untuk melihat tingkat penyimpangan data dapat dilihat dari nilai standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Pada variabel kinerja keuangan atau PAD (Y) dapat diketahui standar deviasi sebesar 31,948. Hal ini diartikan bahwa data variabel kinerja keuangan atau PAD (Y) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-ratanya (*mean*).

Variabel rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 5 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 19 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RKKD sebesar 9,21 dan standar deviasi sebesar 4,464. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

Variabel rasio aktivitas (RA) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 58 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 82 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RA sebesar 75,33 dan standar deviasi sebesar 8,162. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio aktivitas (RA) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

Variabel rasio derajat desentralisasi (RDD) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 4 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 16 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RDD sebesar 7,97 dan standar deviasi sebesar 3,739. Hal ini

diartikan bahwa data variabel rasio rasio derajat desentralisasi (RDD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

Variabel rasio derajat ketergantungan daerah (RKD) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 80 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 92 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RKD sebesar 87,02 dan standar deviasi sebesar 3,854. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio rasio ketergantungan daerah (RKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

**Tabel 4.22**  
**Deskripsi Data Variabel**  
**Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai**  
**Tahun 2009-2017 (dalam% APBD)**

<b>Tahun</b>	<b>APBD (Y)</b>	<b>RKKD (X<sub>1</sub>)</b>	<b>RA(X<sub>2</sub>)</b>	<b>RDD (X<sub>3</sub>)</b>	<b>RKD (X<sub>4</sub>)</b>
2009	91,04	4,73	57,60	4,36	92,12
2010	97,18	5,06	66,43	4,26	84,24
2011	94,83	5,20	75,86	4,57	87,90
2012	95,20	8,72	75,66	6,99	80,21
2013	86,93	8,03	81,03	6,91	86,06
2014	92,76	10,04	80,94	8,95	89,17
2015	92,46	10,23	80,22	9,28	90,71
2016	91,15	11,90	78,46	10,63	89,37
2017	89,55	18,98	81,76	15,82	83,38

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018

Adapun hasil olah data statistik deskriptif Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2009-2017 menggunakan IBM SPSS Statistics Version 25 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4. 23**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**(APBD)**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RKKD	9	5	19	9,21	4,464
RA	9	58	82	75,33	8,162
RDD	9	4	16	7,97	3,739
RKD	9	80	92	87,02	3,854
APBD	9	87	97	92,34	3,126
Valid N (listwise)	9				

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistics Version 25, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang berasal dari hasil output IBM SPSS Statistics Version 25 menunjukkan bahwa jumlah sampel atau N data valid yang akan diteliti adalah 9 sampel. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan variabel dependen yaitu variabel kinerja keuangan atau APBD (Y) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 187 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 97 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) variabel kinerja keuangan atau APBD (Y) sebesar 92,34. Untuk melihat tingkat penyimpangan data dapat dilihat dari nilai standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Pada variabel kinerja keuangan atau APBD (Y) dapat diketahui standar deviasi sebesar 3,126. Hal ini diartikan bahwa data variabel kinerja keuangan atau APBD (Y) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata ratanya (*mean*).

Variabel rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 5 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 19 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RKKD sebesar 9,21 dan standar deviasi sebesar 4,464. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio kemandirian keuangan daerah

(RKKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

Variabel rasio aktivitas (RA) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 58 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 82 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RA sebesar 75,33 dan standar deviasi sebesar 8,162. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio aktivitas (RA) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

Variabel rasio derajat desentralisasi (RDD) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 4 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 16 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RDD sebesar 7,97 dan standar deviasi sebesar 3,739. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio rasio derajat desentralisasi (RDD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

Variabel rasio derajat ketergantungan daerah (RKD) memiliki skor terendah (*minimum*) adalah 80 dan skor tertinggi (*maximum*) adalah 92 dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) RKD sebesar 87,02 dan standar deviasi sebesar 3,854. Hal ini diartikan bahwa data variabel rasio rasio ketergantungan daerah (RKD) dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yaitu senilai 18,98 dan terendah pada tahun 2009 yaitu 4,73. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.
2. Rasio Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) cenderung mengalami penurunan dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 42,4% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,16%. Besarnya rasio aktivitas pada Kota Binjai tahun 2009-2017 menunjukkan bahwa yang lebih prioritas adalah belanja tidak langsung (belanja rutin). Oleh karena itu, rasio belanja langsung yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Binjai.
3. Rasio Desentralisasi cenderung menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Binjai masih sangat kurang. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2009-2017 yaitu 7,97. Jika ditinjau

dalam skala interval kemandirian keuangan daerah maka rata-rata tersebut masih tergolong dalam kategori sangat kurang (0,00-10,00%).

4. Rasio Ketergantungan Daerah cenderung mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2009 yaitu 92,12% dan paling terendah yaitu pada tahun 2012 yaitu 80,21%. Dimana pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah dengan nilai tertinggi pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2012.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil studi, selanjutnya baik untuk kepentingan praktis maupun kepentingan studi selanjutnya, maka disampaikan saran sebagai berikut;

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kota Binjai dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar kemandirian dan kemampuan daerah menjadi lebih meningkat dengan cara mengagali potensi pendapatan asli daerah yang baru.
2. Pemerintah Kota Binjai hendaknya lebih banyak mengalokasikan dana untuk pembangunan atau belanja langsung yang relatif kecil bahkan dibawah 50% dari total belanja daerah dibandingkan dengan anggaran yang bersifat operasional atau belanja tidak langsung.
3. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel penelitian serta tahun penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah, agar dapat memberikan gambaran kinerja pemerintah yang lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *“Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah”*. Yogyakarta : penerbit Graha Limo.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Azhar, Mks. (2010). *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sebelum dan setelah otonomi daerah.”* *Jurnal Ekonomi*
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Darise.. (2009). *“Mengungkapkan Berlakunya Otonomi Daerah*
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Halim, Abdul (2009). *“Defenisi Rasio yang Mengandung Arti Ttingkat Ketergantungan Daerah ”*
- Helfert, A, Erich, D.B.A., (2010). *Teknik Analisis Keuangan*, Ciracas Jakarta : Penerbit Erlangga
- Heriati, dan Nordiawan. (2010) . *pengukuran kinerja secara sistematis*
- Kasmir , (2011). *“Defenisi Rasio Aktivitas/Keserasian”*
- Mahmudi, (2016). *Manajemen Keuangan Daerah Akuntansi Publik* , Ciracas Jakarta : penerbit Erlangga
- Mahmudi. (2011). *“Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Perbandingan Antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah*

- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mamesah, Halim. (2009). *Keuangan Daerah*.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nordiawan, Deddi. S.E., Ak., M.M. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Prof, Dr, Mardiasmo, MBA, Ak, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Renyowiyono. (2009). “*Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Sebagaimana Undang-Undang Dasar*”
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sihombing, Lv, Yonge, S.E., M.B.A. (2011). “*Manajemen APBD,*” Medan : Penerbit Bina Media Perintis.
- Silvia, Debby. (2013). “*Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintahan kota Tanjung Balai Tahun 2008-2012*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*

Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.

Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.

Wahyuni, Nanik. (2009). “*Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*” *Jurnal Fakultas Ekonomi Kota Malang*

Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melengkapi sistem*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. web.10 juni 2011